

Determinasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Diprovinsi NTB: Analisis Tahun 2020-2024

Nanda Asri Ayu Safitri^{1*}, Endang Astuti²

^{1,2} Prodi Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia.

Email: nandaasri17@gmail.com^{1*}, e_astuti13@unram.ac.id²

Histori Artikel:

Dikirim 12 Mei 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Safitri, N. A. A., & Astuti, E. (2026). Determinasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Diprovinsi NTB: Analisis Tahun 2020-2024. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 5001-5011. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.7198>.

Abstrak

Dampak PAD, Dana Perimbangan, dan PDRB terhadap Pengeluaran Daerah di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB dari tahun 2020 hingga 2024 merupakan pokok bahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan pendekatan kausal menggunakan analisis regresi data panel, dengan ukuran sampel 50, satu variabel dependen, dan tiga variabel independen: PAD, Dana Penyeimbang, dan PDRB. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Daerah dipengaruhi secara positif tetapi tidak signifikan oleh PAD dan Dana Penyeimbang, sedangkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan PDRB memiliki dampak positif dan substansial terhadap Pengeluaran Daerah. Ketiga variabel ini juga memiliki dampak substansial terhadap Pengeluaran Daerah, dengan nilai R^2 sebesar 94%. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi peningkatan PAD yang terus-menerus memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah untuk mendanai inisiatif pembangunan, ketergantungan fiskal pada dana transfer pusat tetap dominan. Studi ini menyoroti perlunya pemerintah daerah untuk mengubah ekspansi ekonomi menjadi peningkatan basis pajak otonom. Ketergantungan fiskal harus dikurangi dan keberlanjutan pembangunan regional jangka panjang harus dipastikan dengan mengarahkan alokasi pengeluaran ke industri produktif.

Kata Kunci: Belanja Daerah; PAD; Dana Perimbangan; Produk Domestik Regional Bruto.

Abstract

The impact of PAD, Balancing Fund, and GDP on Regional Expenditure in 10 districts/cities in NTB Province from 2020 to 2024 is the subject of this study. This study uses a quantitative methodology, with a causal approach using panel data regression analysis, with a sample size of 50, one dependent variable, and three independent variables: PAD, Balancing Fund, and GDP. The findings of this study show that Regional Expenditure is positively but not significantly affected by PAD and Balancing Funds, while post-pandemic economic recovery and GDP have a positive and substantial impact on Regional Expenditure. These three variables also have a substantial impact on Regional Expenditure, with an R^2 value of 94%. This conclusion suggests that, despite the continuous increase in PAD that gives local governments more freedom to fund development initiatives, fiscal dependence on central transfer funds remains dominant. The study highlights the need for local governments to transform economic expansion into an increase in the autonomous tax base. Fiscal dependency must be reduced and the long-term sustainability of regional development must be ensured by directing expenditure allocation to productive industries.

Keyword: Regional Expenditure; Regional Original Revenue; Balance Fund; Gross Regional Domestic Product.

1. Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah di Indonesia, yang berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2014, merupakan inisiatif kunci yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat melalui desentralisasi fiskal. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan teori federalisme fiskal, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tuntutan penduduknya, sehingga penyampaian pelayanan publik secara desentralisasi lebih efektif daripada sistem terpusat. Meskipun demikian, situasi saat ini menunjukkan tantangan signifikan akibat kesenjangan kapasitas fiskal di berbagai daerah. Di Provinsi NTB, kemandirian fiskal masih cukup terbatas, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada Dana Penyeimbang daripada memandang pemerintah pusat sebagai sumber pendanaan utama mereka. Meskipun diharapkan PAD dapat menjadi sumber keuangan yang signifikan untuk pengeluaran daerah, komposisinya di NTB masih sangat dipengaruhi oleh dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.

Tabel 1. Data total Realisasi belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan PDRB kab/kota di NTB

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)	Dana Perimbangan (Rp Juta)	Produk Domestik Regional Bruto (Rp Juta)	Belanja Daerah (Rp Juta)
2020	1.811,01	9.880,03	94.164,01	13.871,36
2021	1.983,96	10.324,85	96.298,28	14.942,42
2022	2.009,39	11.870,42	102.888,0,75	16.076,5
2023	2.142,08	12.907,37	104.499,20	15.799,52
2024	3.369,92	12.655,62	109.784,54	18.484,66

Data keuangan dari kabupaten dan kota di Provinsi NTB antara tahun 2020 dan 2024 mengungkapkan beberapa perubahan yang menarik. PDRB menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, mengindikasikan pemulihan setelah pandemi. Namun, pada tahun 2023, terjadi situasi yang tidak biasa di mana pengeluaran daerah menurun meskipun terjadi peningkatan PAD dan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan pengeluaran di NTB dipengaruhi tidak hanya oleh sumber daya keuangan tetapi juga oleh seberapa baik pemerintahan dijalankan, yang perlu diteliti lebih lanjut. PAD terus meningkat, dengan lonjakan yang signifikan pada tahun 2024, mencapai Rp 3.369,92 miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya keras untuk menjadi mandiri secara finansial dengan meningkatkan PAD. Meskipun demikian, cara pendanaan pembangunan di Provinsi NTB masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini terlihat jelas dari besarnya dana penyeimbang dibandingkan dengan kontribusi PAD, dengan transfer pemerintah pusat mencapai Rp 12.655 miliar. 62 miliar pada tahun 2024. Besarnya Dana Penyeimbang menunjukkan bahwa daya beli daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan nasional. Meskipun pengeluaran daerah secara umum meningkat seiring dengan pendapatan, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang tidak biasa, sehingga pengeluaran turun menjadi Rp 15.799,52 miliar dari tahun sebelumnya. Situasi ini patut dicermati lebih lanjut karena penurunan pengeluaran terjadi sementara PAD dan PDRB meningkat, menunjukkan bahwa faktor lain selain kapasitas keuangan berperan dalam seberapa efektif dana digunakan di daerah-daerah tersebut. Penelitian ini penting untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh studi-studi sebelumnya, yang sebagian besar hanya melihat periode sebelum pandemi. Dengan berfokus pada tahun 2020 hingga 2024, studi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang memengaruhi PAD, Dana Penyeimbang, dan PDRB terhadap Pengeluaran Daerah di kabupaten dan kota di Provinsi NTB, dan sejauh mana kemandirian keuangan dapat dicapai meskipun bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, ketika pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat juga. Hal ini sangat diperlukan karena pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola berbagai hubungan yang muncul dalam masyarakat, seperti yang berkaitan dengan hukum, pendidikan, rekreasi, dan budaya, di antara lainnya. Berdasarkan hukum Wagner, beberapa faktor dapat diidentifikasi yang berkontribusi pada pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor tersebut meliputi perluasan peran dalam pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, peningkatan layanan kesejahteraan, pertumbuhan operasi perbankan, dan promosi inisiatif pembangunan.

2.2 Teori Federalisme Fiskal

Oates (1972) menciptakan teori ini, yang menyoroti bagaimana desentralisasi fiskal dapat mengarah pada kesejahteraan publik dengan memberikan pemerintah daerah pengetahuan yang lebih besar tentang kebutuhan penduduknya, sehingga menghasilkan penyampaian layanan publik yang lebih efektif. Desentralisasi fiskal memberikan setiap daerah wewenang dari pemerintah pusat untuk menyelidiki sumber daya keuangannya guna membiayai kebutuhan daerahnya, termasuk pengeluaran modal serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari pemerintah daerah.

2.3 Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk menangani dan mengawasi urusan administrasi dan kebutuhan masyarakatnya dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan Otonomi Daerah menawarkan peluang signifikan bagi daerah untuk meningkatkan hasil keuangan mereka. Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan meningkatkan aset lokal mereka; namun, salah tafsir terhadap otonomi daerah, yang sering disebut sebagai *automoney*, telah menciptakan tuntutan besar bagi daerah untuk merancang berbagai strategi keuangan untuk mendukung pengalihan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Tjandra, 2016).

2.4 PAD

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2019, PAD adalah hak daerah yang meningkatkan nilai aset bersih. Hal ini berasal dari pajak daerah, biaya, keuntungan dari pengelolaan aset daerah tertentu, dan sumber-sumber PAD legal lainnya. Dengan meningkatkan PAD, daerah memperoleh fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk menutupi pengeluaran mereka tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

2.5 Dana Perimbangan

Dana Penyeimbang adalah sumber daya moneter yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung daerah otonom dalam melaksanakan upaya desentralisasi. Dana ini mencakup berbagai elemen, khususnya DAU, DAK, dan DBH. Penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Fajar (2017) menunjukkan bahwa Dana Penyeimbang secara signifikan memengaruhi pengeluaran daerah. Dana ini berfungsi sebagai bantuan dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dalam pembiayaan daerah untuk operasional pemerintah. Melalui pemanfaatan Dana Penyeimbang, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan terstimulasi, sehingga meningkatkan standar ekonomi. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan PAD, sehingga mengurangi kebutuhan transfer dana di masa mendatang.

2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai output bersih dari semua aktivitas ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu. Ekonomi riil tercermin dalam PDRB. Daerah dengan PDRB tinggi seringkali mendorong pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk mempertahankan pembangunan. Pemerintah daerah

RESEARCH ARTICLE

didorong untuk meningkatkan pengeluaran guna mendukung dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah dengan fondasi ekonomi yang kuat dan PDRB tinggi.

2.7 Belanja Daerah

Berdasarkan Permen No. 13 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, keuangan daerah dialokasikan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan yang berada dalam yurisdiksi daerah, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan opsional. Alokasi keuangan ini meliputi pengeluaran langsung serta pengeluaran tidak langsung.

3. Metode Penelitian

Studi ini merupakan analisis numerik yang menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya dan bertujuan meneliti hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Analisis ini menguji hubungan tersebut dengan menggunakan regresi data panel yang berasal dari data BPS Provinsi NTB dan Direktorat Jenderal Neraca Keuangan. Data sekunder yang digunakan mencakup informasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Neraca, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengeluaran Daerah untuk delapan kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat, dan Bima, serta dua kota, Mataram dan Bima, selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan perangkat lunak EViews 12. Proses analisis meliputi evaluasi tiga model utama: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model yang paling sesuai, dilakukan uji spesifikasi model seperti Uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, serta Uji Hausman dan Uji Pengali Lagrange untuk memilih antara FEM dan REM, dengan tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik termasuk uji normalitas dengan uji Jarque-Bera, uji multikolinearitas melalui matriks korelasi variabel independen, uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glacier, dan uji autokorelasi untuk memastikan tidak adanya korelasi antar elemen observasi yang berurutan secara waktu atau spasial. Analisis regresi data panel ini menggabungkan data lintas sektoral dan deret waktu, dengan persamaan dasar yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk pengujian hipotesis, digunakan uji t secara parsial untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%, serta uji F untuk menguji pengaruh gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Koefisien determinasi (R^2) juga dihitung untuk menunjukkan proporsi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, dengan rentang nilai antara 0 dan 1.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.651723	(9,37)	0.0024
Cross-section Chi-square	31.782711	9	0.0002

Berdasarkan tabel 2, uji Chow digunakan untuk menilai model CEM terhadap FEM. Kriteria penentuannya bergantung pada nilai probabilitas penampang F. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, FEM dipilih sebagai model; sebaliknya, jika nilai probabilitas melebihi 0,05, model CEM dipilih. Hasil uji

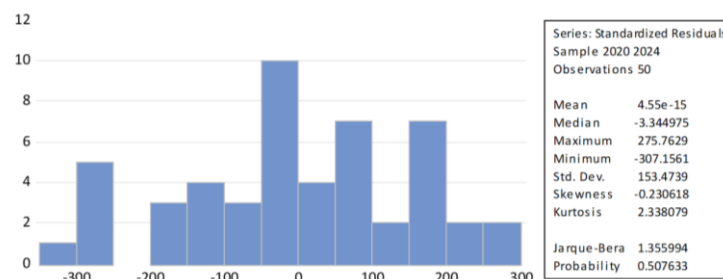
RESEARCH ARTICLE

Chow menunjukkan bahwa probabilitas penampang F adalah 0,0002, yang kurang dari 0,05, sehingga model yang dipilih adalah FEM.

Tabel 3. Uji Hausman

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.777601	3	0.0000

Menurut Uji Hausman yang ditunjukkan pada tabel 3, probabilitas untuk Cross-Section adalah 0,0000. Karena angka ini di bawah 0,05, model terbaik yang digunakan adalah FEM.



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1, hasil uji Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,507633. Karena nilai ini melebihi 0,05, kita menerima hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa nilai residual dalam model regresi ini mengikuti distribusi normal. Akibatnya, asumsi normalitas terpenuhi, sehingga model tersebut sesuai untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X2
X1	1.00000000	0.48875923	0.47539166
X2	0.48875923	1.00000000	0.57710957
X3	0.47539166	0.57710957	1.00000000

Koefisien korelasi X1 dan X2, X1 dan X3, serta X2 dan X3 semuanya kurang dari 0,85, yaitu masing-masing 0,48875923, 0,47539166, dan 0,57710957. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data tersebut bebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.136769	38.39492	0.237968	0.8132
X1	0.000155	0.000305	0.508277	0.6143
X2	0.000814	0.023228	0.035039	0.9722
X3	0.000442	0.005143	0.085916	0.9320
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.218963	Mean dependent var	17.76177	
Adjusted R-squared	-0.034347	S.D. dependent var	18.95105	
S.E. of regression	19.27375	Akaike info criterion	8.974260	
Sum squared resid	13744.67	Schwarz criterion	9.471386	
Log likelihood	-211.3565	Hannan-Quinn criter.	9.163569	
F-statistic	0.864408	Durbin-Watson stat	2.746632	
Prob(F-statistic)	0.587939			

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan tabel yang disajikan, skor kemungkinan untuk variabel X1 adalah 0,6143, untuk X2 adalah 0,9722, dan untuk X3 adalah 0,9320. Skor probabilitas total untuk variabel independen menunjukkan angka yang melebihi 0,05.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

F-statistic	1.750586	Prob. F(2,44)	0.1856
Obs*R-squared	3.685353	Prob. Chi-Square(2)	0.1584

Dengan menggunakan informasi dari tabel di atas, kita dapat melakukan uji autokorelasi dengan melihat angka probabilitas chi-square pada Obs*R-squared, yaitu 0,1584 dengan variabel dependen RESID. Angka di atas 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 7. Regresi data panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	193.7690	353.4739	0.548185	0.5869
X1	0.004034	0.002807	1.436955	0.1591
X2	0.243126	0.213842	1.136941	0.2629
X3	0.103230	0.047351	2.180087	0.0357

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.940585	Mean dependent var	1605.380
Adjusted R-squared	0.921315	S.D. dependent var	632.5644
S.E. of regression	177.4393	Akaike info criterion	13.41403
Sum squared resid	1164935.	Schwarz criterion	13.91116
Log likelihood	-322.3507	Hannan-Quinn criter.	13.60334
F-statistic	48.81154	Durbin-Watson stat	2.403450
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil regresi data panel yang dilakukan dengan metode FEM, kita sampai pada persamaan berikut:

$$Y = 193.7690 + 0.004034*(X1) + 0.243126*(X2) + 0.103230*(X3)$$

Output model diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 193.760, yang bernilai positif. Variabel PAD Asli (X1), Dana Penyeimbang (X2), dan PDRB (X3) semuanya bernilai nol (tidak berubah), menunjukkan peningkatan sebesar 193.760 pada Pengeluaran Daerah.
- 2) Variabel X1, yang mewakili PAD asli, memiliki nilai 0,004034, menunjukkan hubungan searah. Peningkatan 1% pada PAD Asli (X1) akan menghasilkan peningkatan 0,004034% pada Pengeluaran Daerah (Y).
- 3) Dengan nilai koefisien 0,243126, variabel X2 (Dana Perimbangan) memiliki korelasi positif dengan Pengeluaran Daerah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada Dana Penyeimbang akan menghasilkan peningkatan 0,243126 (0,243%) pada Pengeluaran Daerah.
- 4) Dengan nilai koefisien 0,103230, PDRB, atau variabel X3, berkorelasi positif dengan variabel Pengeluaran Regional. Ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada PDRB akan menghasilkan kenaikan 0,103230 (0,103%) pada Pengeluaran Regional.

4.1.1 Uji T

Tujuan uji t adalah untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Uji t membantu menentukan pentingnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dengan menilai nilai probabilitas terhadap ambang batas signifikansi (0,05).

RESEARCH ARTICLE

Tabel 8. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	193.7690	353.4739	0.548185	0.5869
X1	0.004034	0.002807	1.436955	0.1591
X2	0.243126	0.213842	1.136941	0.2629
X3	0.103230	0.047351	2.180087	0.0357

Berdasarkan temuan dari estimasi FEM yang ditunjukkan pada tabel, berikut ringkasan efek parsialnya:

- 1) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai t-statistik 1,436955 dan nilai signifikansi 0,1591. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kita menolak H1. Ini berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Daerah di kabupaten dan kota di NTB, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.
- 2) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Dana Penyeimbang memiliki nilai t-statistik 1,136941 dan nilai signifikansi 0,2629. Karena nilai signifikansi ini melebihi 0,05, maka kita menolak H2. Ini menunjukkan bahwa Dana Penyeimbang memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan, terhadap Pengeluaran Daerah di kabupaten dan kota di NTB.
- 3) Hasil dari pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel PAD Asli memiliki statistik t sebesar 2,180087 dan nilai signifikansi sebesar 0,0357. Karena nilai signifikansi di bawah 0,05, kita menerima H3. Ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Daerah di kabupaten dan kota NTB.

4.1.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen (X1, X2, dan X3) secara kolektif memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 9. Uji F

R-squared	0.940585	Mean dependent var	1605.380
Adjusted R-squared	0.921315	S.D. dependent var	632.5644
S.E. of regression	177.4393	Akaike info criterion	13.41403
Sum squared resid	1164935.	Schwarz criterion	13.91116
Log likelihood	-322.3507	Hannan-Quinn criter.	13.60334
F-statistic	48.81154	Durbin-Watson stat	2.403450
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada saat yang sama, nilai prob.(f-statistik) yang kurang dari 0,05 ($0,000000 < 0,05$) dapat dilihat. Nilai Prob(F-statistik) $0,000000 < 0,05$ mengarah pada penerimaan H4. Pada saat yang sama, Pengeluaran Daerah (Y) sangat dipengaruhi oleh PAD (X1), DP (X2), dan PDRB (X3).

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.940585	Mean dependent var	1605.380
Adjusted R-squared	0.921315	S.D. dependent var	632.5644
S.E. of regression	177.4393	Akaike info criterion	13.41403
Sum squared resid	1164935.	Schwarz criterion	13.91116
Log likelihood	-322.3507	Hannan-Quinn criter.	13.60334
F-statistic	48.81154	Durbin-Watson stat	2.403450
Prob(F-statistic)	0.000000		

Statistik R-squared adalah 0,940585. Ini menunjukkan bahwa 94% perubahan dalam Pengeluaran Regional dapat dijelaskan oleh faktor PAD, DP, dan PDRB dalam analisis ini. 6% sisanya disebabkan oleh variabel yang tidak termasuk dalam model.

4.2 Pembahasan

Dampak PAD terhadap Pengeluaran Daerah menunjukkan bahwa meskipun PAD memiliki pengaruh positif, pengaruh ini tidak signifikan terhadap pengeluaran daerah di 10 wilayah di Provinsi NTB antara tahun 2020 dan 2024. PAD yang mewakili kemandirian keuangan daerah, porsinya yang terbatas dari keseluruhan anggaran kabupaten/kota di NTB, menyebabkan daerah-daerah tersebut tidak memiliki fleksibilitas anggaran yang cukup untuk memprioritaskan pengeluaran berdasarkan PAD. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak dan pungutan daerah belum berhasil menciptakan ruang keuangan yang cukup untuk secara signifikan memengaruhi total pengeluaran pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Handayani dkk. (2022), yang mencatat bahwa peran utama transfer dana dari pemerintah pusat tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pengeluaran daerah di NTB. Akibatnya, perubahan PAD biasanya tidak berdampak kuat terhadap bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. Selanjutnya, dampak Dana Perimbangan terhadap Pengeluaran Daerah juga menunjukkan pengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Secara teori, Dana Penyeimbang merupakan sumber pendanaan utama bagi banyak daerah di NTB untuk mendukung operasional dan proyek pembangunan mereka. Namun, kurangnya signifikansi dalam model ini menunjukkan bahwa dana transfer telah dialokasikan oleh pemerintah pusat, sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk secara bebas memutuskan pengeluaran mereka. Hal ini menciptakan situasi anggaran yang kaku, di mana sebagian besar dana transfer hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rutin, seperti membayar staf dan kewajiban lainnya, tanpa selalu menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengeluaran daerah secara keseluruhan.

Berbeda dengan variabel keuangan lainnya, PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil di Provinsi NTB sangat terkait dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Sesuai dengan Hukum Wagner, pertumbuhan aktivitas ekonomi mengharuskan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran publik guna menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Seiring pertumbuhan ekonomi lokal, permintaan terhadap layanan publik meningkat, sehingga pemerintah distrik/kota harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mengimbangi pertumbuhan basis ekonomi di wilayah mereka. Hasil ini mendukung penelitian Winda Maulia dkk. (2025), yang menyoroti bahwa faktor ekonomi riil merupakan pendorong utama peningkatan pengeluaran pemerintah daerah di NTB, terutama untuk pengeluaran modal. Terakhir, secara kolektif, PAD, Dana Perimbangan, dan PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Daerah, sebagaimana dibuktikan oleh nilai R^2 sebesar 94%. Angka ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini secara bersama-sama menjadi faktor yang kuat dalam menjelaskan tren pengeluaran daerah di kabupaten dan kota Provinsi NTB. Hal ini menyiratkan bahwa pengeluaran daerah tidak berasal dari satu faktor tunggal, melainkan dari kombinasi pengaruh PAD, dukungan keuangan dari pemerintah pusat, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa model yang digunakan sangat efektif dalam menggambarkan perilaku fiskal dan anggaran daerah di NTB, di mana unsur fiskal dan makroekonomi bekerja secara bersamaan dalam menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan pengeluaran pemerintah.

5. Kesimpulan

Pengeluaran daerah di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB diproyeksikan berada pada tingkat yang sama antara tahun 2020 dan 2024. Berdasarkan hasil penelitian, PAD memiliki dampak positif tetapi kecil terhadap pengeluaran daerah, sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan PAD belum menjadi faktor signifikan dalam memengaruhi tingkat pengeluaran daerah, kemungkinan karena porsinya yang kecil dari APBD secara keseluruhan. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap pengeluaran daerah di seluruh kabupaten/kota di NTB bersifat positif namun moderat, sehingga H2 dibantah. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh cara alokasi dana transfer yang ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk memodifikasi pengeluaran secara keseluruhan. Sebaliknya, PDRB daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran daerah, sehingga

RESEARCH ARTICLE

H3 disetujui. Menurut Hukum Wagner, pertumbuhan ekonomi nyata membutuhkan peningkatan layanan publik dan infrastruktur, yang secara otomatis memerlukan pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Selain itu, pengeluaran daerah di kabupaten/kota di NTB sangat dipengaruhi oleh PDB, Dana Perimbangan, dan PAD, sehingga H4 didukung. Dengan koefisien determinasi sebesar 94%, model penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut sangat berhasil menjelaskan perubahan pengeluaran daerah secara keseluruhan. Berdasarkan temuan ini, saran yang dapat diberikan adalah bahwa unsur-unsur yang memengaruhi pengeluaran lokal yang diungkapkan dalam penelitian ini hanyalah sebagian dari faktor-faktor yang berperan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan aspek lain seperti faktor demografis atau inflasi guna mengembangkan model yang lebih lengkap dan akurat. Selain itu, karena penelitian ini terbatas pada periode lima tahun, yaitu 2020-2024, disarankan bagi peneliti yang ingin menyelidiki unsur-unsur yang memengaruhi pengeluaran daerah untuk mempertimbangkan durasi penelitian yang lebih panjang agar hasilnya menjadi lebih komprehensif.

6. Referensi

- Ainun Ningsih Nasution, D. S. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(2), 247–261.
- Akuntansi, J. K., Wati, M. R., Fajar, C. M., & Ekonomi, F. (2017). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota Bandung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 63–76.
- Alifia Siska Yuliana, & Kiky Asmara. (2024). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 540–551.
- Anika Syahdila, & Muchtolifah. (2016). Analisis pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 19(5), 1–23.
- Arioyuda, F., & Sbm, N. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum, dan PAD terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 141.
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis PAD, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Wacana Publik*, 15(02), 75–85. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.71>.
- Fatharani, M., Fadliyanti, L., & Agustiani, E. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Provinsi NTB. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v1i1.128>.
- Faza, M. A. F. B. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal dan PDRB terhadap kemiskinan Jawa Timur. *Development Economic and Social Studies*, 3(1), 1–15.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., Anwar, S., Ekonomi, F., & Salatiga, I. (2022). Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 17(April), 41–57.
- Hermawan, A. D., & Y, D. W. (2004). Pengaruh PAD (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), dan Dana Alokasi Khusus (Dak) (Studi empiris pada pemerintah daerah se-Malang Raya). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1–11.

RESEARCH ARTICLE

- Juanda, Bambang, D. H. (2016). Melalui reformasi kebijakan belanja daerah berkualitas (decentralization fiscal consolidation through policy reform of local quality spending). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15–28.
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2015). Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Maad Adnan, Siti Sriningsih, A. Z. W. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Provinsi NTB. *Ekonobis*, 11(2), 205–213.
- Mafahir, A., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis pengaruh PAD, DAK, dan DAU terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi NTB. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 143–152.
- Malau, Y. N., Silitonga, I. D., Silaban, R. J., Hasugian, N., & Siahaan, B. T. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja daerah pada Provinsi Riau tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3509. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4555>.
- Nurlina. (2015). The effect of government expenditures on Indonesia economic growth. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.14414/jebav.v18i1.377>.
- Pratama, B. A. (2021). Analisis faktor yang mempengaruhi belanja daerah kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2009–2018. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 9(1), 41–48. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v9i1.643>.
- Ritonga, F. D. S., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten/kota Sumatera Utara (2018–2019). *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.20>.
- Safaah, N., Syani, Z., Aprilianto, F., & Anwar, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 60–74.
- Samto, Maftuhannisak, Yani, & Jamil, M. S. (2025). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah (periode 2021–2023). *Realisasi APBD Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 20*.
- Sari, D. A. (2013). Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Boyolali.
- Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah (Studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(22).
- Sari, I. N., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan Dana Alokasi Umum. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(12).
- Savitri, C., Faddila, S. P., Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Nuraini, A., Taufik, U., & Rohana, H. (2021). *Statistik multivariat dalam riset* (D. (c) I. Ahmaddien, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.

RESEARCH ARTICLE

Septiyani, D., Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 464–471. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.98>.

Sugiono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Zahroo, A. F. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 88–104.